

Ganjil Genap akan Gantikan Sistem Satu Arah di Puncak

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana mengganti sistem satu arah (one way) dengan ganjil genap.

Pemkab masih akan melakukan uji coba kedua ganjil genap pada Jumat hingga Minggu (10-12/9). Sebelumnya, ganjil genap sudah diuji coba akhir pekan lalu.

"Meski banyak yang protes, rencananya dipertahankan, karena dampaknya dilihat lebih efektif dibandingkan penerapan one way," tegas Bupati Bogor Ade Yasin, Kamis (9/9).

Namun, kata Ade, penetapan keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi uji coba ganjil genap yang kedua pada Jumat hingga Minggu. Nantinya, sebelum mengambil keputusan itu, ia juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Tetap akan kami konsultasikan. Kita juga sudah

meminta pemerintah pusat, melalui Dirjen Perhubungan, untuk sama-sama mengkaji, agar aturan ini benar-benar efektif, tidak sia-sia," kata Ade.

Terpisah, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor.

"Terkait ganjil genap ini, kami juga masih melihat, seberapa efektif. Yang paling penting lalu lintas lancar, masyarakat tetap tidak berkerumun saat PPKM turun level," tegasnya.

Pihaknya juga akan menunggu arahan Menteri Perhubungan, jika sudah mendapatkan hasil evaluasi ganjil genap uji coba kedua. "Pokoknya nanti kita lihat hasil evaluasi uji coba kedua. Kalau dirasa lebih efektif dari one way, bisa kita pertahankan ganjil genap," pungkasnya. ● **gio**

CEGAH BANJIR BERULANG

Pemkab Bogor akan Bangun Bendungan Cidurian Jasinga

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana membangun bendungan untuk mencegah banjir bandang Cidurian, Jasinga yang selalu berulang. Pemkab juga berencana merelokasi rumah

warga yang berada di dekat bibir sungai. Hal itu dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat meninjau lokasi terdampak bencana banjir akibat luapan air Sungai Cidurian, Selasa (7/9) kemarin.

Ade menyebut, banjir Cidurian kerap berulang setiap tahun. Karena begitu banyak air yang tidak tertampung, maka perlu ada bendungan. "Tahun lalu di sini juga banjir, maka tahun ini ada rencana membangun bendungan, prosesnya sedang lelang dan saat ini sedang masa sanggah, mudah-mudahan hari Kamis atau Jumat sudah bisa langsung turun ke lapangan untuk perbaikan," ungkap Ade.

Dalam upaya pencegahan, Ade menugaskan BPBD Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya bencana tersebut. Hujan Senin (6/9) lalu, lanjutnya, tidak terlalu deras dan hanya sekitar dua jam. Namun, air meluap dari hulu sungai di Sukajaya.

"Penyebabnya ini perlu diselidiki lebih lanjut, saya tugaskan BPBD bekerja sama dengan BIG, untuk dilihat penyebabnya apa," katanya.

Pascabanjir, ada dua keluarga yang terdampak, satu rumah yang fondasinya hancur dan satu yang rumahnya setenang hancur. Semua tidak luput dari perhatian kita, termasuk di kampung sebelah ada beberapa warga yang semalam mereka menolok dievakuasi.

"Saya perintahkan Camat dan jajarannya untuk membujuk mereka agar mau direlokasi. Bantuan-bantuan sudah dikirimkan," jelas Ade.

"Kita fokus kepada pembangunan bendungan supaya air mengalir sesuai jalurnya. Kita akan mengembalikan aliran air sungai ke jalur semestinya," katanya. ● **gio**

spasial (BIG) untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya bencana tersebut. Hujan Senin (6/9) lalu, lanjutnya, tidak terlalu deras dan hanya sekitar dua jam. Namun, air meluap dari hulu sungai di Sukajaya.

"Penyebabnya ini perlu diselidiki lebih lanjut, saya tugaskan BPBD bekerja sama dengan BIG, untuk dilihat penyebabnya apa," katanya.

Pascabanjir, ada dua keluarga yang terdampak, satu rumah yang fondasinya hancur dan satu yang rumahnya setenang hancur. Semua tidak luput dari perhatian kita, termasuk di kampung sebelah ada beberapa warga yang semalam mereka menolok dievakuasi.

"Saya perintahkan Camat dan jajarannya untuk membujuk mereka agar mau direlokasi. Bantuan-bantuan sudah dikirimkan," jelas Ade.

"Kita fokus kepada pembangunan bendungan supaya air mengalir sesuai jalurnya. Kita akan mengembalikan aliran air sungai ke jalur semestinya," katanya. ● **gio**

spasial (BIG) untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya bencana tersebut. Hujan Senin (6/9) lalu, lanjutnya, tidak terlalu deras dan hanya sekitar dua jam. Namun, air meluap dari hulu sungai di Sukajaya.

"Penyebabnya ini perlu diselidiki lebih lanjut, saya tugaskan BPBD bekerja sama dengan BIG, untuk dilihat penyebabnya apa," katanya.

Pascabanjir, ada dua keluarga yang terdampak, satu rumah yang fondasinya hancur dan satu yang rumahnya setenang hancur. Semua tidak luput dari perhatian kita, termasuk di kampung sebelah ada beberapa warga yang semalam mereka menolok dievakuasi.

"Saya perintahkan Camat dan jajarannya untuk membujuk mereka agar mau direlokasi. Bantuan-bantuan sudah dikirimkan," jelas Ade.

"Kita fokus kepada pembangunan bendungan supaya air mengalir sesuai jalurnya. Kita akan mengembalikan aliran air sungai ke jalur semestinya," katanya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PELEPASAN KONTINGEN JAWA BARAT KE PON PAPUA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) memberikan sepeda kepada perwakilan atlet yang akan berlaga di PON Papua saat pelepasan Kontingen Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/9). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas dan mengukuhkan 779 atlet asal Jawa Barat yang akan berlaga di PON Papua.

Pendapatan Perusahaan di Kab. Bogor Terjun Bebas hingga 80 Persen

Akibat penurunan produksi hingga pendapatan, akibatnya berpengaruh pada operasional perusahaan. Salah satu akibatnya, perusahaan di Kabupaten Bogor tidak sedikit yang memutuskan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya.

CIBINONG (IM) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor menyampaikannya, pandemi Covid-19 membuat pendapatan perusahaan di kabupaten Bogor mengalami penurunan hingga 80 persen pada triwulan pertama Tahun 2021.

"Selain penurunan produksi, pemasaran hasil produksi, dalam negeri dan ekspor terganggu hingga mengalami penurunan pendapatan dari 50 sampai dengan 80 persen," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Apindo Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar kepada wartawan, Kamis (9/9).

Ia menerangkan butuh stimulus kebijakan dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat

maupun pemerintah pusat agar perusahaan yang tergabung dalam Apindo kembali meningkat pendapatannya.

"Akibat penurunan produksi hingga pendapatan itu maka pastinya berpengaruh pada operasional perusahaan di Kabupaten Bogor. Salah satu akibatnya, perusahaan tidak sedikit yang memutuskan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya," terangnya.

Iskandar sapaan akrab pria berkaca mata ini menuturkan pada Tahun 2020, jumlah pekerjanya yang dirumahkan sebanyak 10.271 dan yang di-PHK sebanyak 1.966 pekerjanya.

"Sementara, untuk data triwulan I tahun 2021 belum ada

data yang kami terima dari Disnaker Kabupaten Bogor yang kami prediksi bisa mengalami peningkatan jumlah pegawai yang di-PHK, dirumahkan ataupun pengangguran," tutur Iskandar.

Ia berharap kebijakan Pemkab Bogor dengan program Pancakarsanya, yakni karsa membangun, bisa mengambil langkah-langkah tertulis untuk menyelamatkan industri di Kabupaten Bogor.

"Setidaknya ada empat poin penting yang dibutuhkan para pengusaha di Kabupaten Bogor agar tetap bertahan dalam masa pandemi covid-19 untuk berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Pertama, kemudahan berinvestasi dengan memangkas banyaknya alur birokrasi, pengurangan pajak atau retribusi daerah, menunda kenaikan pajak atau retribusi daerah dan mempermudah penyesuaian upah (UMK) selama Pandemi," harapnya.

Selain itu, Iskandar melanjutkan bahwa Pemkab Bogor juga harus segera melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021

atau pelaksanaan dari UUCK nomor 11 Tahun 2020 secara konsisten dan tidak berpihak.

"Karena menyelamatkan industri berarti juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya. juga mencari solusi penyelamatan Industri Padat Karya di Kabupaten Bogor yang sudah tidak diatur dalam UUCK dan PP diatas, namun masih beroperasi dengan mempekerjakan ratusan ribu tenaga kerja," lanjut Iskandar.

BOR di RS Rujukan Covid-19 Jabar 11,77 Persen, Kasus Aktif Tinggal 8.000

BANDUNG (IM) - Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Barat terus menurun. Saat ini, BOR di Jawa Barat berada di titik paling rendah, yaitu 11,77 persen sejak pencatatan yang dilakukan Pikobar pada 6 Oktober 2020 lalu.

Dari 14.374 IT (tempat tidur) yang tersedia di 387 rumah sakit rujukan Covid-19, tempat tidur yang terisi hanya 1.692. Data itu ditampilkan di laman Pikobar pada 9 September 2021 pukul 13.00 WIB. Kemudian ruang perawatan intensif (ICU) pun turun ke angka 20,34 persen.

"BOR hari ini 11 persen, kemudian 11 daerah sudah PPKM Level 2, dan 16 sudah PPKM Level 3 tidak ada yang level 4 sehingga pembekuan sekolah, sarana publik itu juga sudah mulai dicicil," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (9/9).

Kemudian, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga melaporkan bahwa saat ini jumlah warga yang dirawat atau menjalani isolasi tinggal 8.000-an orang. Tentu kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan masa-masa awal PPKM yang jumlah kasus

Ia menjelaskan langkah-langkah yang disarankan tersebut merupakan langkah yang strategis yang mestinya dilakukan pemerintah daerah dalam mengupayakan para pengusaha agar tidak pindah ke daerah lain.

"Di tengah pemberlakuan PPKM ini, kami berharap kebijakan di atas agar dapat segera diwujudkan, karena kita tidak tahu pasti kapan Pandemi Covid-19 akan berakhir," pungkasnya. ● **gio**

BOR di RS Rujukan Covid-19 Jabar 11,77 Persen, Kasus Aktif Tinggal 8.000

aktifnya pernah mencapai 120 ribu. "Kami tiptip walau kedaruratan sudah lewat tingkat kasus sudah turun, itu tengah euforia tetap jaga protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi," katanya.

Terkait prosedur atau protokol kesehatan di perkantoran non esensial, saat ini Kang Emil masih menunggu arahan dari pusat. Kabarnya, siang ini, ia akan melakukan video conference dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

"Belum bisa saya sampaikan, tapi intinya ada penyesuaian pelonggaran jumlah yang bisa bekerja secara normal di kantor masing-masing," katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku bisnis di bidang restoran dan kafe tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai sanksi berupa penutupan terjadi seperti di kafe Holywings Jakarta.

"Masih ada restoran dan kafe yang tidak membatasi kuota, jangan warga nanti tempat wisata dan restoran ditutup, karena sanksi melanggar kuota yang disepakati seperti kasus di Jakarta juga," ujarnya. ● **pur**

Bengawan Solo Tercemar Limbah Ciu

SEMARANG (IM) - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pencemaran aliran Sungai Bengawan Solo akibat limbah industri pengolahan ciu sudah keterlaluannya sehingga perlu dilakukan tindakan tegas.

"Menurut saya ini sudah kebangetan karena tidak hanya area di Bora, di Solo juga kena. Jadi sebenarnya ini yang hari ini coba kita cari," ujar Ganjar di Semarang, Kamis (9/9).

Ganjar mengungkapkan modulus pencemaran Sungai Bengawan Solo kali ini juga masih sama dengan kasus sebelumnya yaitu membuang kotoran atau limbah pengolahan alkohol di sekitar Bora.

Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terkait kasus tersebut karena pihak yang membuang limbah pengolahan ciu tersebut sudah menantang pemerintah, terlebih dalam kasus sebelumnya sudah diberikan teguran keras.

"Sudah dicek, langsung rapat virtual tadi dengan Kementerian LHK. Tentu saja tim lokal sudah turun, tim nasional juga turun, nanti kita akan proses, kita akan cari," tegasnya.

Tim khusus dari Pemprov Jateng diketahui sudah diterjunkan untuk melakukan pengecekan dan observasi terkait air Sungai Bengawan Solo yang berwarna keruh.

Observasi itu dilakukan setelah Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Solo meng-

entikan pengolahan air di Pos Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, karena air sungai terindikasi tercemar limbah ciu, tepatnya pada hari Selasa (7/9) pagi.

Adapun kasus pencemaran limbah ciu di aliran Sungai Bengawan Solo juga sempat terjadi pada 2019 lalu dan saat itu diketahui bahwa pencemaran bersumber dari limbah industri pengolahan ciu di sekitar hulu sungai.

Polisi menyatakan ada hukuman pidana bagi perusahaan pembuang limbah langsung ke sungai Bengawan Solo yang tak mengindahkan sanksi administratif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui, pembuangan limbah secara langsung ke sungai tersebut menyebabkan air menghitam. Setidaknya, ada 63 perusahaan di Soloraya yang disanksi.

Pencemaran di Bengawan Solo tidak hanya berasal dari industri besar. Tak sedikit industri mikro dan kecil di daerah Soloraya yang membuang limbah langsung ke anak sungai Bengawan Solo tanpa melalui pengolahan limbah yang baik.

Perusahaan-perusahaan tersebut kedapatan membuang limbah ke sungai tanpa melakukan pengolahan limbah. Air limbah langsung dibuang ke sungai melalui saluran bypass. "Kebanyakan (perusahaan) tekstil di Karanganyar, Sukoharjo, dan Sragen. Di Solo ada tapi cuma sedikit," kata Plt. Kepala DLHK Provinsi Jateng, Widi Hartanto, Rabu (8/9). ● **pur**

MNC Lido City Jadi KEK Pariwisata

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri serah terima Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penetapan MNC Lido City sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 16 Juni 2021.

PP tersebut diserahkan kepada PT MNC Land Tbk (KPIG), di kawasan KEK Lido City Kecamatan Gigombong, Kabupaten Bogor, oleh Deputi VI Kemenko Perekonomian Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utama mewakili Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Executive Chairman MNC Group sekaligus Direktur Utama KPIG, Hary Tanoesoedibjo.

Acara ini disaksikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Momen penting ini juga dirangkai dengan acara peletakan batu pertama untuk pembangunan Lido World Garden, dengan tagline "Beyond A Family Edutainment Paradise", Lido World Garden merupakan taman bunga seluas 17 Ha yang dihiasi berbagai koleksi spesimen flora langka.

Executive Chairman MNC Group sekaligus Direktur Utama KPIG, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, kemarin, melalui aturan tersebut, kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut resmi menjadi KEK. Ground breaking beberapa kawasan pun sudah dilakukan dan targetnya selesai tahun depan.

"Saat ini termasuk ground breaking (kawasan Lido) mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diselesaikan," kata Hary Tanoesoedibjo dalam Peresmian Ground Breaking Lido World Garden, Rabu (8/9).

Lebih jauh dikatakan Hary, investor dan pelaku usaha dapat insentif, pembangunan kawasan dirancang menjadi kawasan enter-

tainment dan hospitality.

Proyek Lido World Garden yang mulai ground breaking hari ini mengacu pada konsep Magical Garden di Dubai. Dalam kawasan MNC Lido City, pembangunan juga meliputi lapangan golf seluas 80 hektar, kawasan music and art center, kawasan movie land, dan theme park. Seluruh proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2022.

"Kawasan yang cukup besar tidak jauh dari tempat ini akan dihibahkan tempat untuk padepokan dan masjid sehingga kawasan ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk beribadah. Pak Gubernur nanti secara khusus meresmikan padepokan tersebut yang cukup strategis tempatnya," tutur Hary.

Sementara Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyatakan sangat menyambut baik pembangunan Lido City, kemudian dirinya sangat bangga karena KEK Lido City merupakan Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Jawa Barat, sehingga akan jadi model lompatan-lompatan ekonomi. ● **gio**



IDN/ANTARA

PENCAPAIAN PROGRAM BURUAN SAE DI BANDUNG

Warga merawat sayuran hidroponik dengan media bambu di Kelompok Buruan Sae Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/9). Program Buruan Sae yang ditujukan untuk menghadirkan ketahanan pangan di lingkungan kelurahan tersebut hingga September 2021 telah mencapai 190 kelompok buruan sae di 111 kelurahan di Kota Bandung.

Isak Tangis Wali Murid yang tak Mampu Bayar Seragam Rp1,7 Juta

SURABAYA (IM) - Retno Sulitjaningsih Nunuk (52), terus terisak saat menceritakan pengalamannya yang diwajibkan membeli seragam sekolah oleh SMPN 29 Surabaya, tempat di mana putranya bersekolah. Ia yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun mencurahkan kesulitannya di DPRD Surabaya, Kamis (9/9).

Nunuk mengaku tidak mampu membayar lantaran biaya seragam mencapai Rp 1.730.000. Nominal itu untuk empat setelan seragam, meliputi setelan putih biru, batik celana putih, pramuka, serta baju olahraga dan beberapa atribut sekolah.

"Kita mau beli di luar juga nggak oleh (nggak boleh), katanya seragamnya ada cirinya sendiri," ujar Nunuk saat ke kantor DPRD Surabaya.

Di hadapan Sekretaris Fraksi PIDIP, Abdul Ghoni Mukhlis Ni'am, Nunuk menjelaskan dirinya adalah seorang janda dengan penghasilan Rp 800 ribu per bulan dari kerjanya menjadi buruh bersih rumah di Surabaya.

Sambil sesekali menyeka air mata, Nunuk mengurai jika sekolah menerapkan sistem cicilan untuk pembelian seragam dengan uang muka Rp 300 ribu dan selanjutnya diangsur setiap bulan.

"Diwajibkannya itu seperti ini, kalau ada yang bayar 300 juga bayar," terangnya.

Hal ini berbeda ketika anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar.

"Kalau SD-nya ini dapat seragam, sampai kelas enam itu, saya malah nggak pernah beli," imbuhnya.

Karena kebijakan sekolah yang dirasanya memberatkan wali murid, Nunuk hanya bisa pasrah. Ia pun merayu anaknya agar mau mengenakan seragam lama saat menjalani pembelajaran tatap muka.

Menanggapi aduan itu, Abdul Ghoni Mukhlis Ni'am berjanji akan membantu penyelesaian masalah tersebut.

"Harusnya pihak sekolah paham betul, kami di DPRD Surabaya sudah menganggarkan seragam untuk masyarakat MBR dan Mitra Warga," ujar Ghoni.

Ghoni memastikan dirinya akan pasang badan jika di kemudian hari ada yang merisak Nunuk dan putranya selama di sekolah.

"Ini adalah keberanian, beliau adalah masyarakat MBR yang sewajarnya pula ditanggung kesejahteraannya oleh pemerintah, jika nanti ada pembullyan laporan kembali pada saya," tegas anggota Komisi C DPRD Surabaya, itu. ● **pra**



IDN/ANTARA

EDUKASI IMUNISASI BAGI MURID MELALUI DONGENG

Anggota komunitas Kampung Dongeng Indonesia mendongeng di hadapan murid kelas 1 SDN 28 Kota Jambi saat kegiatan imunisasi campak di Jambi, Kamis (9/9). Pemberian materi dongeng tentang manfaat imunisasi bagi anak menggunakan cara menghibur dan bahasa sederhana tersebut bertujuan menciptakan suasana bersahabat sebelum dan pada saat imunisasi dilakukan.